

## **Jurnal Imiah**

# **PENETAPAN PROVINSI GORONTALO SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PROGRAM ART GOLD UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP) PADA TAHUN 2009-2013**

*Determination of Gorontalo Province as a Place of ART Gold UNDP program in 2009-2013*

Oleh: Rezky Ramadhan Antuli, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Sosial dan Politik.

### **Abstrak**

Tujuan terpenting dari skripsi ini adalah untuk menjelaskan program UNDP yang diterapkan di provinsi Gorontalo dalam rangka percepatan pembangunan di daerah Gorontalo melalui program inisiatif kerjasama internasional. Organisasi internasional seperti UNDP memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan bantuan terhadap negara atau daerah yang masih berkembang dan terus melakukan pembangunan. Dalam kerjasama internasional diperlukan beberapa faktor yang itu menjadi kepentingan atau target daerah-daerah untuk di capai secara bersama-sama. Untuk menjelaskan problematika yang menjadi fokus dalam penelitian ini maka dibutuhkan penggunaan teori kerjasama internasional dan kosep pembangunan. Secara metodologi, penelitian ini menggunakan teknik analisa data kualitatif. Sementara teknik penggunaan datanya melalui metode wawancara untuk data primer dan studi kepustakaan untuk data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dipilihnya provinsi Gorontalo sebagai tempat pelaksanaan program UNDP dikarenakan beberapa faktor yaitu karena provinsi Gorontalo memiliki komoditas unggulan di bidang pertanian dan terus melakukan pembangunan ekonomi. Analisa dari penelitian menitikberatkan pada peningkatan pembangunan provinsi Gorontalo setelah diterapkan program ini dan bagaimana

provinsi Gorontalo dapat menguatkan perannya dalam dunia internasional dengan terus melakukan inovasi-inovasi yang baru dalam pembangunan daerah.

**Kata kunci :** *Organisasi Internasional, Pembangunan, Kerjasama Internasional*

## **1. Pendahuluan**

Di Indonesia UNDP berkomitmen untuk mendukung prioritas nasional Indonesia dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah di Indonesia 2010-2015 dan lainnya pembangunan nasional dan daerah visi, strategi dan rencana. UNDP bekerja untuk mendukung perjuangan Indonesia melawan kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mengurangi kesenjangan antara kelompok dan daerah, dan membantu mencapai delapan Millennium Development Goals pada tahun 2015 di seluruh negeri.

Sebagai prestasi terbaru dari UNDP, UNDP memfasilitasi kemitraan strategis antara pemerintah daerah dan 37 OMS untuk menyediakan layanan dasar, terutama bagi masyarakat terpencil, di Papua dan Papua Barat. Kemitraan ini telah mencapai 114 komunitas dan layanan tertutup termasuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui produksi minyak kelapa, budidaya ikan, peningkatan pendidikan dini melalui sekolah-sekolah desa dan pembangunan infrastruktur dasar. UNDP juga memfasilitasi pendirian 18 pusat sumber daya masyarakat untuk memperkuat kapasitas praktisi pembangunan di tingkat desa.

Kegiatan lainnya yang termasuk dalam rangkaian program UNDP di Indonesia adalah Program ART GOLD Indonesia / Srilanka. ART Gold adalah inisiatif kerjasama internasional, yang dipelopori oleh UNDP, bersama beberapa program dari badan-badan di

Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta pelaku pembangunan lainnya. Program ini mempromosikan jenis baru multilateralisme dimana Perserikatan Bangsa-Bangsa bekerja sama dengan pemerintah untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat lokal serta aktor-aktor sosial di Selatan dan Utara dalam mempromosikan tata pemerintahan yang baik dan proses pembangunan lokal. Pada tingkat internasional, ART mempromosikan kerjasama kemitraan jangka panjang desentralisasi yang berkelanjutan antara pemerintah daerah dan para aktor sosial dalam masyarakat, swasta dan asosiatif Selatan dan Utara.

UNDP ART Gold Indonesia (selanjutnya AGI) dan ART Gold di Sri Lanka (selanjutnya AGSL) melalui program yang dirancang untuk membantu pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia dan Sri Lanka. Di Indonesia daerah yang menjadi tempat pelaksanaan program ini adalah Provinsi Gorontalo dan di Sri Lanka adalah Provinsi Southern. United Nations Development Programme (UNDP) mengalokasikan dana siap pakai sebesar US\$3 juta untuk program Kerja Sama Selatan-Selatan yang melibatkan Indonesia. Selain itu juga telah disiapkan dana sebesar US\$ 6 juta yang baru tersedia jika program sudah berjalan. Program kerja sama yang akan diluncurkan di Jakarta, pada tanggal 17 tahun 2009 ini merupakan proyek perintis pertama di Asia. Dalam keterangan tertulis UNDP dijelaskan, kerja sama ini di dukungan oleh Jaringan Tematik dan Teritorial Pembangunan Manusia atau *Appui aux Réseaux Territoriaux et Thématique de Développement Humain (ART)*. Program ART baru dilaksanakan di dua negara yakni Indonesia dan Sri Lanka. (Mahbub, 2008).

## **2. Landasan Teori**

### **2.1 Teori Kerjasama Internasional**

Kerjasama internasional dapat terselenggara berkat adanya kesamaan visi dan keselarasan kepentingan diantara aktor-aktor yang berinteraksi. Melalui kerjasama internasional, suatu pihak mengharapkan kepentingannya akan lebih mudah diwujudkan daripada berusaha sendiri. (Klikbbm, 2010).

Kerjasama internasional bukan saja dilakukan antar negara secara individual, tetapi juga dilakukan antarnegara yang bernaung dalam organisasi atau lembaga internasional. Kerjasama internasional terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan. Berbagai masalah tersebut maka beberapa negara membentuk suatu kerjasama internasional. Lingkup aktivitas yang dilaksanakan melalui kerjasama internasional antar negara meliputi berbagai kerjasama multidimensi, seperti kerjasama ekonomi, kerjasama dalam bidang sosial, dan kerjasama dalam bidang politik. (K.J Holsti, 1988).

### **2.2 Konsep Pembangunan**

Pembangunan dimengerti sebagai pergerakan kualitatif dan kuantitatif menuju sasaran yang pantas dan dapat diraih. Pembangunan ekonomi juga seringkali didefinisikan sebagai suatu proses berdimensi jamak yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan kelembagaan nasional, seperti halnya percepatan

pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan, dan pemberantasan kemiskinan absolut.

Michael P. Todaro mengatakan setidaknya ada tiga komponen dasar atau tata nilai inti yang harus dipenuhi sehubungan dengan terwujudnya konsep “pembangunan”. Tiga tata nilai inti pembangunan itu adalah :

1. Nafkah hidup: kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) yang terdiri dari kebutuhan pangan, papan, kesehatan, dan perlindungan.
2. Harga diri : menjadi orang, dimengerti sebagai terpenuhinya unsur pengakuan dan penghormatan.
3. Bebas dari perbudakan, konsep kebebasan di sini dimaksudkan sebagai kebebasan yang lebih mendasar atau emansipasi dari keterasingan kondisi-kondisi material dalam kehidupan dan dari perbudakan sosial, terhadap alam, kebodohan orang lain, kesengsaraan, lembaga-lembaga, dan kepercayaan yang bersifat dogmatis. (Erika, 2008).

Pengalaman di tahun-tahun 1960-an menunjukkan bahwa beberapa negara berkembang berhasil meningkatkan pertumbuhannya dalam tingkat tinggi, namun gagal memperbaiki taraf hidup sebagian besar masyarakatnya. Sehingga kemudian muncul koreksi terhadap pengertian pembangunan, yaitu upaya penghapusan atau pengurangan tingkat kemiskinan, penanggulangan ketimpangan tingkat pendapatan antar penduduk dan penyediaan lapangan kerja dalam konteks perekonomian yang terus berkembang.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

UNDP memilih Provinsi Gorontalo dilatarbelakangi oleh beberapa faktor diantaranya:

#### **1. Memiliki komoditas unggulan di bidang pertanian.**

Pelaksanaan program dari UNDP yang dinamakan ART Gold atau inisiatif kerjasama yang diterapkan di provinsi Gorontalo dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Hal tersebut dikarenakan Provinsi Gorontalo mempunyai komoditas unggulan pada sektor pertanian. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa program UNDP merupakan program kerjasama maka perlunya daerah yang lain untuk dijadikan partner dari provinsi Gorontalo, dan dalam hal ini UNDP memilih provinsi Southern di Srilanka, karena daerah ini juga memiliki komoditas unggulan yang sama dengan provinsi Gorontalo di bidang pertanian.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari pihak UNDP di provinsi Gorontalo, provinsi Gorontalo dan provinsi Southern bekerjasama untuk saling melengkapi komoditas unggulannya dalam bidang pertanian. Dalam hal ini provinsi Gorontalo memiliki keunggulan dalam pengelolaan jagung sedangkan provinsi Southern unggul dalam penerapan sistem asuransi pertanian yang sudah lama diterapkan di provinsi tersebut.

Teori kerjasama internasional menjelaskan bahwa kerjasama internasional dapat terselenggara berkat adanya kesamaan visi dan keselarasan kepentingan diantara aktor-aktor yang berinteraksi. Melalui kerjasama internasional, suatu pihak mengharapkan kepentingannya akan lebih mudah diwujudkan daripada berusaha sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut provinsi Gorontalo dan provinsi Southern ditetapkan sebagai tempat pelaksanaan

program kerjasama karena kedua daerah memiliki kepentingan atau visi yang sama tentang bagaimana membangun daerahnya dalam pengembangan komoditas yang sama dan menjadi unggulannya di bidang pertanian.

Di provinsi Gorontalo sendiri dalam mencapai target pertama dalam kriteria ekonomi yang sehat, pemerintah provinsi Gorontalo mencanangkan program Agropolitan berbasis komoditi jagung, yang dianggap nantinya menjadi lokomotif pembangunan ekonomi secara berkelanjutan. Hal ini juga tidak lain adalah untuk mencapai tujuan ekonomi yang hakiki yaitu menuju kepada ketahanan pangan secara berkelanjutan. Dalam perjalanannya pembangunan pertanian melalui program agropolitan berbasis komoditi jagung telah membawa dampak yang sangat signifikan bagi pembangunan ekonomi di Provinsi Gorontalo, hal ini ditandai dengan meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya melebihi angka rata-rata nasional. Provinsi Gorontalo sendiri mempunyai beberapa strategi pembangunan pertanian.

Untuk mewujudkan pembangunan pertanian di Provinsi Gorontalo, dikenal 9 faktor yang merupakan 9 pilar strategi pelaksanaan pembangunan ekonomi melalui program agropolitan. Ke 9 pilar ini telah dilakukan bersama-sama oleh seluruh stakeholder yang ada, juga telah ditetapkan sebagai indikator pertanian modern yang akan dicapai.

Adapun sembilan pilar tersebut adalah sebagai berikut ;

- a. Pengembangan dan Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian serta Angkutan Agropolitan.

- b. Menyediaan dana penjaminan petani (APBN + APBD + ASKRINDO + Bank BRI + Bank Mandiri + Bank BNI).
- c. Penyediaan benih / bibit unggul, pupuk dan pengendalian hama penyakit.
- d. Memperlancar pemasaran dengan jaminan harga dasar melalui BUMD.
- e. Pembangunan penyediaan irigasi dan Jalan Akses Agropolitan.
- f. Percontohan / Show Window disetiap Kabupaten / Kota serta Posko Agropolitan.
- g. Peningkatan SDM Pertanian.
- h. Meningkatkan peran maize center dalam penelitian pengkajian teknologi serta penerapan teknologi baru.
- i. Perencanaan dan koordinasi.

Dengan strategi diatas, hasil pembangunan pertanian khususnya angka produksi komoditi penghasil kalori utama masyarakat yaitu komoditi jagung mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

## **2. Provinsi Gorontalo merupakan provinsi yang terus berkembang dalam pembangunan ekonominya.**

Provinsi Gorontalo tentunya merupakan provinsi yang masih berumur sangat muda dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Sejak di tetapkannya provinsi Gorontalo sebagai daerah/provinsi pemekaran dari Sulawesi Utara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2000, provinsi Gorontalo terus melakukan pembangunan dalam berbagai bidang dan lebih ditekankan pada pembangunan ekonominya.

Dalam konsep pembangunan sendiri pembangunan ekonomi seringkali didefinisikan sebagai suatu proses berdimensi jamak yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan kelembagaan nasional, seperti halnya percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan, dan pemberantasan kemiskinan absolut. Provinsi Gorontalo meskipun berumur belum genap 10 tahun, tetapi prestasinya jauh lebih baik daripada daerah otonom lainnya yang lebih tua. Beberapa indikator keberhasilan pembangunan Provinsi Gorontalo sendiri dapat dilihat dari peningkatan indeks pembangunan manusia (pada 2006 sebesar 68,98 menjadi 69,79 pada 2009), pertumbuhan ekonomi (pada 2006 sebesar 7,06 % menjadi 7,63 % pada 2009), serta penurunan angka kemiskinan hingga 23,19 % pada 2010.(Riyadi, 2008).

Mewujudkan masyarakat yang kritis dan mengerti akan partisipasinya dalam pembangunan, tak bisa dilepaskan dengan upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, karena sebagaimana diketahui dalam prioritas pemerataan pembangunan di suatu daerah, kebijakan pembangunannya diadakan pada peran serta masyarakat sebagai penggerak penyelenggaraan pemerintah daerah yang merupakan pengejawantahan dari pembangunan dari rakyat oleh rakyat dan demi kemakmuran serta kesejahteraan rakyat.

Adapun pokok-pokok dan strategi pemberdayaan masyarakat yang bisa dikembangkan di berbagai daerah antara lain : Pertama, penanggulangan kemiskinan, dimana perlu peran serta masyarakat dalam bentuk kemitraan yang berwawasan kebangsaan. Kedua, penajaman program yang diarahkan untuk peningkatan kegiatan yang berorientasi

pada perbaikan ekonomi serta kesejahteraan rakyat. Ketiga, memecahkan keterbelakangan dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk maju, mandiri serta sejahtera. Sasaran dari semua itu adalah ekonomi, masyarakat dan peningkatan pendapatan agar masyarakat miskin bias turun jumlahnya.

Dalam perjalanannya selama beberapa tahun semenjak pisah dari provinsi Sulut, pemerintah provinsi Gorontalo boleh di bilang sangat konsisten dalam masalah mengentaskan kemiskinan. Lihat saja dari data yang dikeluarkan Bappeda provinsi Gorontalo, dimana pada awalnya jumlah kemiskinan yang dimiliki oleh provinsi Gorontalo adalah sebesar 72% dari 848 ribu jumlah penduduk Gorontalo sejak pisah dari provinsi Sulut. Kini angka tersebut mulai menyusut seiring dengan majudan berkembangnya program pemerintah khususnya di sektor pertanian dengan entry point jagung serta perikanan, hingga 29%-33% saja sebagaimana data yang disampaikan oleh BPS dan BKKBN provinsi Gorontalo. (Sabar, 2006).

Provinsi Gorontalo adalah salah satu dari hanya sedikit daerah pemekaran dengan geliat pembangunan yang sangat dinamis. Data indikator makro memperlihatkan trend kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Dari sisi perkembangan sektor riil, indikator pertumbuhan ekonomi Gorontalo, dalam rentang waktu 8 tahun sejak pemekaran berada di atas rata-rata nasional; dengan pertumbuhan rata di atas 5%, dan/atau rata-rata di atas pertumbuhan nasional. Pertumbuhan ekonomi Gorontalo tercatat sebagai pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di regio Sulawesi pada tahun 2004 setelah Sulawesi Tenggara.

Berkaitan dengan data perkembangan daerah di atas, provinsi Gorontalo telah dapat dikatakan mampu melakukan pembangunan daerah dengan sangat baik. Provinsi Gorontalo telah mampu melakukan perubahan-perubahan besar dalam percepatan pertumbuhan ekonomi yang menjadi salah satu kriteria keberhasilan daerah atau provinsi dalam melakukan pembangunan.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, maka dapat di tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Organisasi internasional yang dalam hal ini adalah UNDP memiliki peran yang sangat penting dalam membantu pembangunan di negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia dan Sri Lanka. Program Art Gold UNDP yang diterapkan di Provinsi Gorontalo yang merupakan representasi negara Indonesia dan Southern Province di Sri Lanka merupakan wujud nyata dari peran UNDP dalam peningkatan kesejahteraan di kedua negara.

Program kerjasama Internasional atau ART Gold UNDP di terapkan di Provinsi Gorontalo dan di latarbelakangi oleh beberapa faktor diantaranya :

Pertama, Provinsi Gorontalo mempunyai komoditas unggulan di bidang pertanian serta visi misi dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Provinsi Gorontalo unggul dalam

program agropolitan berbasis komoditas jagung dan sandingkan dengan UNDP dengan Provinsi Southern yang sama unggulnya dibidang pertanian. Provinsi Southern sangat unggul dalam sistem asuransi pertanian yang dengan sistem ini hak-hak dari para petani terlindungi. Berdasarkan keunggulan dari masing-masing provinsi ini apabila kedua provinsi saling menerapkan sistem tersebut satu sama lain, maka yang menjadi program unggulan atau visi misi pembangunan kedua provinsi dalam bidang pertanian akan dengan sangat mudah di capai.

Kedua provinsi tentunya harus saling melengkapi dan berbagi informasi dalam sistem unggulannya tersebut. Dalam kerjasama internasional pun di jelaskan perlu adanya integrasi dan harmonisasi dari kedua negara atau daerah yang ingin bekerjasama. Integrasi dan harmonisasi ini tentunya diperlukan untuk menyelaraskan kepentingan-kepentingan kedua provinsi yang pada dasarnya sama yaitu pada bidang pertanian.

## **5. Daftar Pustaka**

Erika. (2008). *Peran United Nations Development Programme (UNDP) dalam Membantu Pembangunan di Burma (1973-1989)*. Scribd. <https://www.scribd.com/doc/24674291/Peran-United-Nations-Development-Programme-UNDP-Dalam-Membantu-Pembangunan-Di-Burma-1973-1989> (Diakses pada tanggal 8 April 2016 pukul 18.35 WIB).

Haris, S. (2007). *Desentralisasi & Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI Press.

K.J Holsti. *Politik Internsional, Kerangka Untuk Analisis*, Jilid II, Terjemahan M. Tahrir Azhari. Jakarta: Erlangga, 1988, hal. 652-653.

[http://www.academia.edu/6978344/\\_Paradigma\\_Teori\\_Konsep\\_Pembangunan\\_yang\\_Tepat\\_untuk\\_Indonesia](http://www.academia.edu/6978344/_Paradigma_Teori_Konsep_Pembangunan_yang_Tepat_untuk_Indonesia). (Diakses pada tanggal 18 April pukul 21.35).

<http://klikbbm.blogspot.co.id/2013/06/defenisi-kerjasama-internasional.html>.

(Diakses pada tanggal 18 April pukul 23.15).

<http://pengertianmenurutahli.blogspot.co.id/2013/06/kerjasama-internasional-dalam-hubungan.html>. (Diakses pada tanggal 18 April pukul 23.15).

Library.(2010). *PDF undp*. [library.upnvj.ac.id/pdf/2s1hi/206613011/bab2.pdf](http://library.upnvj.ac.id/pdf/2s1hi/206613011/bab2.pdf)

(Diakses pada tanggal 13 April 2016 pukul 15.20 WIB).

Mahbub,H.(2008).*Tempo*.<http://bisnis.tempo.co/read/news/2008/09/17/056135942us-9-juta-untukkerja-sama-selatan-selatan>. (Diakses pada tanggal 20 April 2016).

Riyadi, S. (2008). *Konsep Kerjasama Daerah Antar Daerah dalam Keranga Otonomi Daerah: Peluang dan Tantangan*.[asian.or.id/wp-content/uploads/.../kerjasama-provinsi-slamet.pd](http://asian.or.id/wp-content/uploads/.../kerjasama-provinsi-slamet.pd). (Diakses pada tanggal 13 April 2016 pukul 16.23 WIB).

Sabar, Asep. (2006). *Fadel Solusi Jitu Membangun Daerah*. Jakarta: CV. Arena Seni.

Satwa, Y. P. (2010). *Dasar Penyusunan Program Asuransi Pertanian*.  
ysatwa.blogspot:<http://ysatwa.blogspot.co.id/2010/12/dasar-penyusunan-program-asuransi.html> (Diakses pada tanggal 9 April 2016).

Sorensen, R. J. (2014). *Pengantar Studi Hubungan Internasional, Teori dan Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sudewa, I. P. (2015). *Peran United Development Programme (UNDP) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Etnis Tamil Di Sri Lanka*.<http://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/15918>. (Diakses pada tanggal 14 April 2016 pukul 01.00 WIB).

UNDP.(2009).*ISSUU*.[https://issuu.com/artpublications/docs/provincial\\_dev\\_guidelines\\_gorontalo\\_-\\_indonesian](https://issuu.com/artpublications/docs/provincial_dev_guidelines_gorontalo_-_indonesian). (Diakses pada tanggal 20 April 2016).

UNDP. (2013). UNDP Indonesia: <http://www.id.undp.org/>. (Diakses pada tanggal 20 April 2016).

*UNDP In Sri Lanka*. (2012). <http://www.lk.undp.org/>. (Diakses pada tanggal 20 April 2016).

Wulansari, R. (2011). *Ramadhani'sBlog*. <http://ramadhaniwulansari.blogspot.co.id/2011/07/undp-united-nations-development-programe.html>. (Diakses pada tanggal 21 April 2016).

